



Pemkot Kembali Raih Penghargaan

JOGJA, BERNAS – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta kembali meraih penghargaan atas prestasinya dalam Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten/kota (LHE Lakip) se-Indonesia dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Penghargaan tersebut diserahkan Menpan-RB Asman Abnur kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta, Titik Sulastri, Senin (6/2) di Jogja Expo Center (JEC).

Dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemkot Yogyakarta yang dievaluasi pada tahun 2016, Pemkot berhasil meraih predikat nilai Sangat Baik "BB".

Penghargaan tersebut diberikan kepada Pemkot Yogyakarta atas prestasinya menerapkan manajemen kinerja pemerintahan yang akuntabel dan terukur.

Asman menegaskan penghargaan tersebut jangan dijadikan ajang kompetisi antardae-rah, namun dijadikan sebagai tolak ukur setiap pelaksanaan pembangunan daerah masing-masing.

Usai menerima penghargaan, Sekda Kota Yogyakarta Titik Sulastri mengungkapkan

kegembiraannya atas capaian prestasi yang diraih Pemkot Yogyakarta di bidang akuntabilitas kinerja tersebut.

"Saya berterima kasih kepada seluruh pegawai di lingkup Pemkot Yogya atas kerja keras dan kekompakannya, sehingga kinerja dan prestasi semakin baik, sehingga akuntabilitas kinerja Pemkot Yogyakarta mendapatkan nilai 'BB' dari Kementerian PAN-RB," kata dia.

Nilai yang diperoleh Pemkot Yogyakarta berdasarkan beberapa komponen penilaian seperti Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.

"Target ke depan adalah meraih nilai A untuk LAKIP. Komitmen kita sudah sangat jelas. Semua SKPD harus kerja keras, kerja cerdas dan dengan niatan yang ikhlas. Tahun 2017 tetap prestasi harus ditingkatkan dan kinerja juga harus ditingkatkan. Terpenting adalah kualitas pelayanan kepada masyarakat yang harus kita tingkatkan," jelasnya.

Sementara itu, Deputy Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) RI, Dadang Kurnia, menyatakan

pencapaian kinerja yang baik itu sejalan dengan PP Nomor 60 Tahun 2008.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menandakan sebenarnya ketugasan KPK tidak cukup hanya penindakan, penangkapan, tetapi mampu mencegah terjadinya korupsi di pemerintahan.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutannya mengatakan mewujudkan akuntabilitas kinerja membutuhkan proses panjang, untuk mendorong terjadinya perubahan fundamental, terutama pergeseran dari mental *pangrehpraja* menuju perilaku *pamongpraja* yang lebih mengedepankan aspek pelayanan dan berorientasi hasil.

"*Pangrehpraja* merupakan sikap kolot yang selalu minta dilayani. Sikap itu sudah harus ditinggalkan dalam pengelolaan manajemen birokrasi yang mengedepankan perbaikan pelayanan publik.

Lebih lanjut MenPAN-RB menyampaikan, sebanyak 14 kabupaten/kota dari total 475 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, diketahui masih mendapat nilai D atau sangat kurang. Sementara sebanyak 199 kabu-

paten/kota mendapat nilai CC atau kurang dan sebanyak 193 kabupaten/kota mendapat nilai C atau cukup.

Meski hasil evaluasi SAKIP yang disampaikan tahun ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, Asman Abnur menyebutkan, rata-rata nilai SAKIP sejumlah kabupaten atau kota tersebut masih kategori C sehingga perlu ada upaya meningkatkan kinerja.

"Untuk yang mendapat nilai C itu berarti masih banyak yang tidak sinkron antara program kegiatan serta hasil yang dicapai. Artinya, masih banyak kegiatan yang digelar itu tidak bermanfaat. Ini tantangan bagi pemerintah masing-masing agar terus berupaya memperbaiki kinerjanya," kata dia.

Untuk meningkatkan kinerja, Menpan RB berencana akan memberikan *reward* kepada instansi pemerintah yang nilai LHE AKIP-nya bagus, salah satunya dengan memberikan tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, pihaknya tak segan untuk menahan atau mengurangi penyaluran DAK bagi instansi pemerintah yang nilai LHE AKIP-nya masih C ke bawah, hingga memperbaikinya. Hal ini dilakukan untuk memacu

setiap instansi pemerintah dapat meningkatkan kinerja masing-masing.

"Hal ini demi efektivitas kinerja. Pemberian tambahan DAK bagi instansi bernilai bagus, tentu akan dapat meningkatkan kinerja. Karena akan dipergunakan dengan baik. Sedangkan bagi yang masih C ke bawah, DAK di tahan karena kalau tetap kita berikan DAK pun, pemanfaatannya juga tidak akan bisa maksimal, dan justru mubazir," katanya.

Masih berdasarkan data LHE AKIP tingkat kabupaten/kota tersebut, untuk tahun 2016 diketahui hanya ada 2 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang mendapat nilai A. Sementara 10 kabupaten/kota mendapat nilai BB, dan 57 kabupaten/kota mendapat nilai B. Sedangkan untuk tingkat provinsi sendiri, dari total sebanyak 34 provinsi yang ada di Indonesia, sebanyak 2 provinsi diketahui mendapat nilai C, 10 provinsi mendapat nilai CC, 12 provinsi mendapat nilai B, 7 provinsi mendapat nilai BB, dan 3 provinsi mendapat nilai A.

Di DIY yang terdiri dari empat kabupaten dan satu kota, rata-rata mendapat nilai BB. Hanya Kabupaten Gunungkidul saja yang mendapat nilai B. (jay)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tapem dan Kesra	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005